

Strategi Pengembangan Desa Wisata Syariah Berbasis BUMDes di NTB Menggunakan Pendekatan SWOT Matrix

Zainussani^{1*}, Jehan Ali Azhar²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Email korespondensi: zainussany7@gmail.com

Abstract

The research aims to understand further how the concept of halal tourism villages has become a new innovation in developing tourism activities in villages based on Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in West Nusa Tenggara province. The data used in this research is primary data obtained from interviews with experts (academics) and practitioners including the Community and Village Development Service (DPMD), the Tourism Service, the UKM Cooperative Service, the Indonesian Ulema Council (MUI). And literature studies related to the problems faced in developing BUMDesa-based halal tourism villages in NTB. Several sub-elements of strategies for developing halal tourism villages in West Nusa Tenggara were obtained from literature studies and discussions. These strategies will be outlined in the form of a questionnaire using the Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) Matrix approach following the Internal Factor Analysis (IFAS) and External Factor Analysis (EFAS) indicators. The conclusion of this research is that the development of BUMDes-based Sharia Tourism Villages in NTB offers great potential for economic growth, cultural preservation and environmental sustainability. By actively involving the community in the entire development process, prioritizing environmental sustainability, and maintaining the authenticity of local culture and identity, Sharia Tourism Villages can create a positive impact on local communities, tourists and the surrounding environment.

Keywords: Sharia Tourism, BUMDes, NTB, Strategy

Abstrak

Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami lebih jauh bagaimana konsep desa wisata halal menjadi inovasi baru dalam pengembangan kegiatan wisata di desa berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para ahli (akademisi) dan praktisi antara lain Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan studi literatur terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata halal berbasis BUMDesa di NTB. Beberapa subelemen strategi pengembangan desa wisata halal di Nusa Tenggara Barat diperoleh dari studi literatur dan diskusi. Strategi-strategi tersebut akan dituangkan dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan pendekatan Matriks Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) dengan mengikuti indikator Internal Factor Analysis (IFAS) dan External Factor Analysis (EFAS). Kesimpulan penelitian ini adalah pengembangan Desa Wisata Syariah berbasis BUMDes di NTB menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan, mengedepankan kelestarian lingkungan, serta menjaga keaslian budaya dan identitas lokal, Desa Wisata Syariah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, wisatawan, dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Wisata Syariah, BUMDes, NTB, Strategi

Saran sitasi: Zainussani., & Azhar, J. A. (2024). Strategi Pengembangan Desa Wisata Syariah Berbasis BUMDes di NTB Menggunakan Pendekatan SWOT Matrix. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3353-3365. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13764>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13764>

1. PENDAHULUAN

Potensi sebuah desa sebagai Desa Wisata sering kali menjadi katalis peningkatan ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong antar warga dan konsep keberlanjutan. Desa yang memiliki modal kearifan lokal yang kuat, berbagai adat istiadat, serta kondisi sosial budaya yang unik memiliki nilai tambah tersendiri. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur serta mengurus kepentingannya, sesuai dengan cita-cita yang berlandaskan UUD 1945. Bahkan, menurut Aziz (2016), Nadir (2013), dan Pamungkas (2019), Pemerintah Desa memiliki otonomi dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada. Pengelolaan secara otonomi ini memungkinkan desa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kekhasannya. (Selvia et al. 2023)

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat banyak desa dengan potensi wisata yang menarik, karena provinsi ini kaya akan objek wisata alam dan budaya yang beragam (Wahyuni and Rahmawati 2021). Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di Pulau Lombok (Sukirman and Zulkarnaen 2022). Sejumlah Desa Wisata pun telah dikembangkan dan menjadi destinasi wisata populer di Lombok, seperti Desa Wisata Sukarara Sade, Desa Bonjeruk, dan Desa Sade (Muriano 2019), Desa Barabali, Desa Kuta, Desa Setanggor dan Desa selebung (Amir, Sukarno, and Rahmawati 2020). Selain itu, desa lain di kabupaten berbeda juga mulai berkembang sebagai desa wisata, termasuk Desa Gumantar di Kabupaten Lombok Utara (Tanjung, Bintarti, and Nurpatricia 2022), Desa Buun Sejati di Kabupaten Lombok Barat (Harnika and Sutriani 2022), dan Desa Sembalun Lawang di Kabupaten Lombok Timur (Zaini 2021). Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, pemerintah provinsi berencana mengembangkan 99 desa wisata hingga tahun 2023 (Nisa and Suharti 2023). Pengembangan Desa Wisata di NTB telah dimulai sejak tahun 2019 secara bertahap, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak merusak alam desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, strategi pemberdayaan desa dimulai dengan mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan potensi wisata

yang layak dilestarikan dan dikembangkan. (Lubis and Mubarak 2018)

Dengan perkembangan industri pariwisata, muncul istilah pariwisata halal atau syariah. Pariwisata halal menjadi tren baru dalam dunia pariwisata dan memiliki prospek besar, khususnya di Indonesia yang kaya akan seni, budaya, warisan, dan tradisi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah global. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Grand Launching Pariwisata Syariah pada tahun 2013. (Al Hasan 2017) Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kawasan wisata halal di Indonesia diwujudkan dengan mengkaji aset wisata di daerah-daerah yang dinilai potensial. Bukti dari komitmen ini adalah penetapan 10 destinasi prioritas yang menjadi target pengembangan pemerintah melalui bimbingan teknis dan lokakarya destinasi wisata halal. Menurut Laporan Kementerian Pariwisata Tahun 2018, 10 destinasi prioritas tersebut terletak di 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kepulauan Riau, Aceh, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Desa wisata menawarkan keaslian dalam aspek sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, arsitektur tradisional, dan struktur tata ruang desa, yang semuanya disajikan dalam bentuk integrasi komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung. Keaslian desa memperkuat identitasnya melalui elemen-elemen seperti ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman unik dan eksotis yang khas daerah. Pemodelan desa wisata harus dikembangkan secara kreatif untuk membangun identitas atau ciri khas daerah pedesaan tersebut. Selain itu, desa wisata dapat didefinisikan sebagai integrasi antara akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuringsih et al. 2019). Program pengembangan desa wisata belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga program yang dilakukan hanya menekankan pada luaran tercapainya program. Untuk menangani situasi desa wisata, diperlukan manajemen desa wisata yang melibatkan peran serta

badan usaha milik desa (BUMDesa), seperti yang dilakukan di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. (Hastutik 2020)

Namun, dalam proses pembangunan industri pariwisata di desa, terdapat berbagai hambatan dan tantangan. Masyarakat desa sering kali memiliki stigma negatif tentang dunia pariwisata, yang dianggap dapat mempengaruhi efek sosial dan budaya lokal. Pariwisata sering dikenal dengan citra buruk oleh masyarakat desa, yang hanya melihat dari sudut pandang dampak negatifnya, tanpa menggunakan perspektif yang holistik. Akibatnya, harapan untuk menghadirkan industri pariwisata di desa sebagai inovasi baru menjadi sangat kecil. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk melihat kekuatan dan potensi wisata yang dimiliki oleh desa mereka. (Adinugraha et al. 2020)

Salah satu cara untuk mengintegrasikan seluruh potensi yang ada adalah dengan menjadikan desa-desa di NTB sebagai desa wisata halal. Pengembangan desa wisata halal tidak hanya menjaga nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan tidak menurun atau rusak serta memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. (Adinugraha et al. 2020) Pariwisata halal membawa dampak positif bagi pengembangan nilai-nilai agama Islam dan kepatuhan umat Muslim terhadap agamanya. (Battour, Battor, and Bhatti 2014) Hasil serupa juga dikemukakan oleh Adinugraha (2018), Anwar et al. (2020), dan Yanma & Zaenuri (2021), yang menyatakan bahwa pariwisata halal merupakan potensi terkuat karena mencerminkan kearifan lokal dan budaya masyarakat desa yang mengandung nilai utama yaitu keimanan kepada Allah. Upaya ini dilakukan agar pembangunan desa dalam sektor pariwisata dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. (Battour et al. 2014) Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh bagaimana konsep desa wisata halal menjadi sebuah inovasi baru dalam mengembangkan aktifitas pariwisata di desa berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada provinsi Nusa Tenggara Barat.

LITERATURE REVIEW

Dalam konteks desa wisata, desa wisata merupakan hasil dari pengembangan potensi daerah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Desa ini dianggap sebagai aset pariwisata yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan menjadi produk wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Secara umum, jenis-jenis

desa wisata dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya, sebagai berikut:



Gambar: Karakteristik Desa Wisata

Desa wisata yang menonjol dengan kekayaan sumber daya budaya lokal, seperti tradisi kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya, dianggap sebagai daya tarik utama dalam wisata. Keunikan desa ini terletak pada keragaman adat istiadat yang merupakan bagian integral dari budaya masyarakat pedesaan, mencakup kegiatan sehari-hari, mata pencaharian, praktik keagamaan, dan aktivitas lainnya. (Wirdayanti et al. 2021)

Desa wisata yang menarik perhatian berdasarkan kekayaan sumber daya alamnya, seperti pantai, pegunungan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain, dianggap sebagai daya tarik utama dalam pariwisata. Desa-desa ini terletak di lokasi yang unik seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau, dan berbagai bentuk bentang alam unik lainnya. Karena itu, desa ini memiliki potensi untuk menampilkan pemandangan alam yang indah yang menarik perhatian wisatawan.

Menjadikan desa menjadi destinasi wisata utama berdasarkan keunikan budaya dan sumber daya alamnya. Dengan kata lain, daerah pedesaan menjadi daya tarik tersendiri, dengan perpaduan yang kuat antara sumber daya wisata budaya yang unik, seperti adat istiadat, tradisi, dan gaya hidup masyarakat, serta sumber daya wisata alam, seperti keindahan lanskap dan pemandangan alam.

Desa wisata yang mengunggulkan kekhasan kegiatan ekonomi kreatif, seperti produksi kerajinan tangan, dan lain-lain, sebagai daya tarik utamanya. Hal ini

dikarenakan orisinalitas kegiatan ekonomi kreatif yang berkembang di dalamnya, tumbuh dari kegiatan ekonomi berbasis masyarakat lokal, seperti kerajinan tangan dan seni yang khas. Desa ini menjadi destinasi wisata utama karena memiliki keunikan dan pesona tersendiri sebagai tujuan wisata.

Desa wisata syariah atau desa wisata halal adalah konsep yang menggabungkan pariwisata syariah dengan nilai-nilai kearifan lokal, serta karakteristik sumber daya dan keunikan dari desa tertentu. Dalam pengelolaan desa wisata halal, peran masyarakat desa sangatlah penting. Konsep Desa Wisata Halal ini memperkenalkan perspektif baru yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia dan alam, serta manusia dan Tuhan. Beberapa alasan yang mendasari hal ini adalah:(UNWTO 2011)



Gambar: Integrasi Desa Wisata dengan Wisata Halal

Dalam mengelola desa wisata halal, masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian Desa Wisata Halal, muncul pandangan baru yang menyoroti hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia dan alam, serta manusia dan Tuhan. Beberapa alasan untuk hal ini adalah:

- Pariwisata tidak terjadi dalam ruang hampa; sebaliknya, ini merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari.
- Pariwisata sangat kreatif dan dinamis.
- Pariwisata tidak eksklusif. Ini berarti bahwa pariwisata tidak hanya terkait dengan negara tertentu.
- Pariwisata tidak eksklusif. Dengan kata lain, pariwisata dikaitkan tidak hanya dengan negara tertentu.

Dalam konteks pengembangan pariwisata baru ini, pentingnya sumber daya manusia baik sebagai

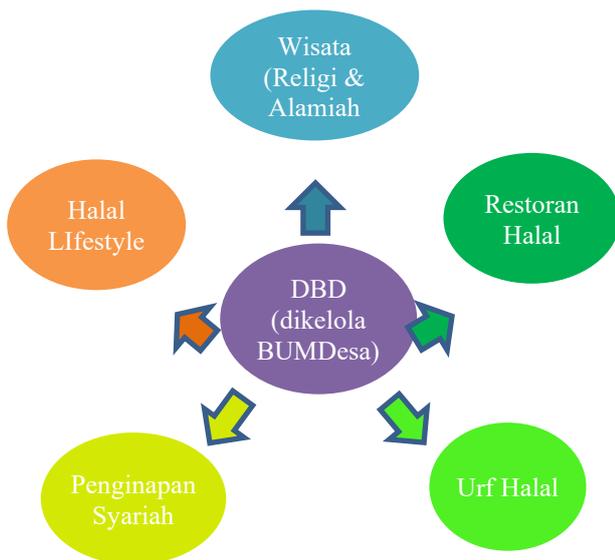
turis maupun tuan rumah sangatlah besar untuk mendukung kesuksesan operasional objek wisata, termasuk desa wisata halal. Peran pemerintah dalam pelaksanaan Desa Wisata Halal bersama masyarakat pedesaan menjadi sangat penting. Ini sejalan dengan tugas pokok pemerintah kota pedesaan, yaitu menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas sehingga warga negara dapat hidup sejahtera, damai, aman, dan berkeadilan. Oleh karena itu, idealnya setiap organisasi negara atau pedesaan harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi rakyatnya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan diri merupakan modal utama yang memungkinkan masyarakat menjadi mandiri. Dari perspektif ini, tujuan pemerintahan desa untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui pelatihan di berbagai bidang. Diharapkan bahwa pelatihan ini dapat membantu masyarakat lokal untuk menjadi mandiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan hukum tunggal yang kepemilikannya dimiliki oleh Desa, baik secara keseluruhan atau sebagian besar, dengan modal yang berasal dari kekayaan perseorangan Desa. BUMDesa bertujuan untuk mengelola barang milik, menyediakan jasa pelayanan, dan melakukan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebesar-besarnya. Pembentukan BUMDesa diatur oleh Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk menghimpun seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang diatur oleh desa dan/atau kemitraan antardesa. Menurut Pasal 72 ayat (1)a Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan awal desa berasal dari tanah BUMDesa dan dana bengkok. Kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada akhirnya bertujuan untuk memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, mendorong inisiatif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan kemitraan usaha antara desa dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta memperkuat kekhasan desa. Pembentukan BUMDesa harus

dilakukan dengan mempertimbangkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan permasalahan ekonomi desa, serta harus diposisikan sebagai strategi yang jelas untuk pengelolaan aset desa. (Rini and Tarigan 2020)

Dalam pengelolaan menuju desa wisata, masalah sistem desa menjadi pedoman utama dalam pengembangan desa wisata yang mendukung kearifan lokal. Idealnya, mengelola desa melalui kelembagaan yang mencerminkan prinsip tata kelola yang baik akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan berdampak positif pada kemandirian desa. BUMDesa memainkan peran penting dalam mengelola desa wisata, misalnya dengan menjual paket liburan ke desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa juga bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kepemudaan dan kelompok informasi wisata (Pokdarwis) yang melakukan kegiatan pariwisata di desa, sehingga memastikan pengelolaan melalui BUMDesa dapat mempermudah pengelolaan desa wisata secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian di atas, secara konseptual konsep Desa Wisata Halal dapat dilihat pada gambar berikut ini: (Adinugraha, Sartika, and Kadarningsih 2018)



Berdasarkan kerangka konseptual Desa Wisata Halal, sektor yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan Desa Wisata Halal adalah sebagai berikut.

Halal Lifestyle

Gaya hidup halal merujuk pada kebiasaan seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Praktik gaya

hidup halal tidak hanya memastikan dan mengontrol moralitas individu, tetapi juga menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia serta mempertahankan integritas dan individualitasnya. Menjalani gaya hidup halal adalah hak bagi setiap Muslim dan juga merupakan hak istimewa bagi setiap non-Muslim. Halal bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, oleh karena itu mari kita mulai menerapkan gaya hidup halal sejak dini (*shalihun linafsiy wa ligairikhi*). (Adinugraha, Sartika, and Ulama'i 2019)

Penginapan berbasis syariah

Pertumbuhan populasi Muslim yang cepat di seluruh dunia membuka peluang besar untuk pangsa pasar hotel Syariah yang signifikan. Konsep Syariah yang diterapkan oleh hotel-hotel ini mencerminkan universalisme moral yang menghargai nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, para pengusaha hotel Syariah dihadapkan pada beberapa tantangan. Meskipun terdapat umat Islam di seluruh dunia, wisatawan yang menginap di hotel Syariah tidak selalu berasal dari negara mayoritas Muslim. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengedukasi dan mempromosikan konsep Syariah kepada non-Muslim. Pengenalan produk dan layanan yang termasuk dalam paket penginapan, seperti kegiatan wisata dan fasilitas tambahan, harus menjadi bagian integral dari strategi promosi hotel Syariah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang prima dan mengimplementasikan konsep Syariah dengan baik, hotel-hotel ini perlu melatih karyawan mereka dalam pemahaman tentang prinsip-prinsip Syariah dan standar layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah. (Mansyuroh 2018)

Wisata (Religi dan Alami)

Wisata halal menawarkan prospek ekonomi yang cerah sebagai bagian dari industri pariwisata Indonesia. Industri pariwisata tidak hanya memberikan manfaat material dan moral bagi para wisatawan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Konsep wisata halal menekankan pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan penyediaan layanan pariwisata, yang berakar pada ajaran agama Islam, sambil tetap menghormati dan ramah terhadap semua wisatawan dan lingkungan. (Jaelani 2017)

Urf Halal

Kearifan lokal yang melekat dalam suatu masyarakat adalah warisan adat dan tradisi yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan

sehari-hari mereka. Bagi Muslim yang memiliki pandangan toleran terhadap prinsip Rahmatan Lil 'Alamin, penting untuk mempertahankan tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tradisi akan terus dijaga dan dilestarikan selama tetap konsisten dengan keyakinan agama dan tidak bertentangan dengan akidah. Konsep urf, atau kebiasaan yang telah mapan dalam masyarakat, dapat menjadi dasar untuk merumuskan undang-undang yang sesuai dengan konvensi yang ada. (Setiyawan 2012)

Restoran Halal

Kehadiran restoran halal tidak dipertanyakan meskipun dikunjungi oleh konsumen Muslim. Mereka berupaya untuk menyediakan lokasi yang luas, meningkatkan daya tarik kunjungan masyarakat, dan bersaing dengan restoran lain di sekitarnya. Restoran tersebut juga menyediakan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (Kusuma, Muhtadi, and Agustin 2022)

Dengan kolaborasi semua elemen di atas dan keterlibatan BUMDesa, akan menghasilkan produktivitas bagi masyarakat dan meningkatkan pemasukan bagi desa. Jika semua aspek dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh BUMDesa, konsep Desa Wisata Halal di atas dapat memberdayakan masyarakat secara signifikan. Terutama bagi desa yang telah maju secara ekonomi dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan memudahkan dalam alokasi sumber daya. BUMDesa perlu menjalin kerjasama dengan semua pihak agar tujuan Desa Wisata Halal, seperti Gaya Hidup Halal, Penginapan Syariah, Urf, Wisata, dan Restoran Halal, dapat terkoordinasi dengan baik di bawah naungan BUMDesa. Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi pihak BUMDesa, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Halal ini diantaranya:

- a. Memperkuat kapasitas SDM yang ada akan meningkatkan efektivitas BUMDes dalam mendukung pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah, sehingga menjadikannya lebih menarik bagi wisatawan.
- b. Mengingat kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, pemerintah desa, BUMDesa, dan Pokdarwis mengadakan seminar kesadaran pariwisata dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.

- c. Mengakselerasi rencana kerja BUMDesa dan pemerintah, terutama untuk desa-desa yang memiliki potensi wisata yang cukup tinggi.

Masyarakat pedesaan memegang peran sentral dalam pembentukan desa wisata halal karena keunikan tradisi, budaya, dan sumber daya alam yang menjadi landasan utama kegiatan tersebut. Hal ini mencerminkan karakteristik Islami yang melekat pada konsep tersebut. Proses pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui pendekatan emansipasi: masyarakat yang menggerakkan, mengelola, dan menjadi manfaat dari program tersebut, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola program-program tertentu, mereka dapat mengatasi tantangan yang sering dihadapi. Contohnya, melalui program Desa Wisata Halal yang berbasis pada kearifan lokal. Masyarakat pedesaan kini siap memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Ada beberapa alasan mengapa mereka tertarik untuk bergabung dalam program Desa Wisata Halal, seperti adanya inisiatif pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata serta tren meningkatnya minat dalam wisata halal dan pariwisata syariah secara global. (Adinugraha et al. 2018)

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pakar (akademisi) dan praktisi, termasuk Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, data juga diperoleh dari studi literatur yang relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata halal berbasis BUMDesa di NTB. Beberapa sub elemen strategi pengembangan desa wisata halal di Nusa Tenggara Barat diperoleh melalui studi pustaka dan diskusi. Strategi-strategi tersebut akan dijadikan dasar untuk penyusunan kuisioner dengan menggunakan pendekatan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Matrix dengan mengikuti indikator Internal Factor Analysis (IFAS) dan External Factor Analysis (EFAS).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Bagian Analisis SWOT Proyeksi Perkembangan Wisata Nusa Tenggara Barat

Matriks ini memungkinkan gambaran yang jelas tentang bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal di NTB dapat dipertimbangkan sehubungan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Dengan menggunakan matriks ini, dapat dihasilkan empat opsi kebijakan yang memungkinkan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal terhadap lingkungan di NTB:



Strength (Kekuatan)

Popularitas desa wisata NTB meluas 99 desa wisata yang tersebar di 10 kabupaten/kota (Jackysan 2022). Setiap destinasi wisata di NTB menawarkan tempat wisata yang unik, menarik dan sarat akan

budaya khas NTB. Destinasi wisata NTB relatif lengkap, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, wisata olah raga, dan wisata buatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai destinasi wisata di NTB.(Rahmad Kurniawan 2019).

Selain itu, dukungan dari BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola aset desa dan menyediakan fasilitas pariwisata syariah. Dengan mengoptimalkan aset desa dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah, BUMDes tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata desa tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal dan pertumbuhan ekonomi desa. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan desa wisata syariah berbasis BUMDes.(DisKominfortikntb 2019) Nusa Tenggara Barat (NTB) terkenal dengan tingkat kesadaran religius yang tinggi di kalangan masyarakatnya. Faktor ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengembangan desa wisata syariah berbasis BUMDes. (Fahham 2017).

Weakness (Kelemahan)

Dalam pengembangan desa wisata syariah berbasis BUMDes di NTB, salah satu kelemahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum yang memadai. Banyak desa wisata di NTB terletak di daerah terpencil dengan akses jalan yang buruk. Kondisi jalan yang rusak, sempit, atau tidak teraspal menyulitkan wisatawan untuk mencapai lokasi wisata. Selain itu, minimnya transportasi umum yang teratur dan nyaman menuju desa wisata membuat wisatawan harus bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi khusus yang mungkin tidak selalu tersedia. Kekurangan konektivitas antara desa-desa wisata dan pusat-pusat kota utama mengakibatkan perjalanan menjadi tidak efisien dan mahal

Masyarakat dan pengelola desa di NTB masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki sertifikasi halal dari MUI. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya tim halal, yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang optimal antara lembaga atau dinas terkait. Kurangnya pemahaman ini menciptakan kelemahan dalam daya saing usaha lokal di pasar yang semakin kompetitif, terutama di pasar yang menekankan produk halal. Akibatnya, banyak usaha lokal di NTB mungkin kehilangan peluang untuk masuk ke pasar yang

menuntut produk halal, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di tingkat lokal. (Zitri et al. 2023)

Oppurtunity (Kesempatan)

Meningkatnya minat wisatawan Muslim yang mencari destinasi yang sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan adanya pasar yang besar dan terus berkembang untuk wisata halal. NTB dapat memanfaatkan tren ini dengan mengembangkan infrastruktur dan layanan yang mendukung wisata halal. Dengan menargetkan wisatawan Muslim, NTB dapat menarik segmen pasar yang lebih luas, baik dari domestik maupun internasional, terutama dari negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Malaysia, Brunei, Timur Tengah, dan lainnya. Strategi pengembangan meliputi menyediakan hotel dan penginapan yang bersertifikat halal, termasuk fasilitas seperti restoran halal, tempat ibadah, dan layanan sesuai syariah. NTB juga dapat mengembangkan destinasi kuliner yang menawarkan makanan dan minuman bersertifikat halal, yang dapat menarik wisatawan Muslim yang memprioritaskan kehalalan makanan. Selain itu, pengembangan paket wisata yang mencakup kunjungan ke tempat-tempat ibadah, serta kegiatan budaya dan religi yang sesuai dengan prinsip Islam, juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan Muslim.

Adanya dukungan dari pemerintah, salah satunya melalui program dan kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata syariah, telah menjadikan desa wisata sebagai salah satu program unggulan. Program ini mendorong pemerintah NTB untuk menjadikan desa wisata sebagai desa wisata halal. Hal ini diungkapkan oleh Kemendes, Kemenpar, dan Wakil Gubernur yang berkomitmen untuk mempercepat pembentukan desa wisata halal ini. Wakil Gubernur bahkan menyatakan bahwa terbentuknya desa wisata adalah mimpinya, dan ia berharap agar di masa depan, desa-desa tersebut memiliki branding dan kekhasan masing-masing. Asosiasi Pariwisata Islami Indonesia (APII) secara resmi telah mengumumkan pembentukan 99 desa wisata halal di NTB. Langkah ini bertujuan untuk menegaskan NTB, khususnya Lombok, sebagai destinasi wisata halal terkemuka di Indonesia bahkan di dunia. (Septono 2023).

Pemerintah NTB juga mendukung penggunaan media digital untuk mempromosikan desa wisata syariah di wilayah tersebut, seperti yang terbukti

melalui berbagai kegiatan pelatihan. Salah satunya adalah Pelatihan Digital Marketing Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB bekerja sama dengan Google, yang ditujukan kepada para Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh NTB. Pelatihan ini dilaksanakan di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dengan jumlah peserta sekitar 80 orang, dan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00 WITA. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan program Desa Wisata Gemilang 2019 – 2023 (NTB 2019). Dan juga Dinas Pariwisata Provinsi NTB juga menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Hotel Lombok Plaza Mataram, yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 10-12 November 2021. Acara pelatihan ini diikuti oleh para pengelola desa wisata dari seluruh NTB dan beberapa Kepala Desa. (NTB 2022)

Threat (Ancaman)

Ancaman yang mungkin muncul terkait perkembangan sektor Pariwisata Halal di Provinsi NTB adalah persaingan dari negara lain yang juga mengembangkan hal yang sama. Menurut Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya, jumlah outbound wisatawan dari Timur Tengah mencapai sekitar 120 juta, dan di Kawasan Asia Tenggara, negara-negara yang banyak menerima wisatawan mancanegara dari daerah tersebut adalah Thailand dan Malaysia. (Tribunnews.com, 2016 Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat dalam hal penerimaan wisatawan mancanegara, setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Malaysia sendiri, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, menempati peringkat pertama dalam berbagai kriteria Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018, selama delapan tahun berturut-turut, menurut Mastercard-Cresentrating (2018). Sedangkan untuk tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia, termasuk tiga provinsi utamanya seperti NTB, tengah mengembangkan potensi wisata halalnya untuk menarik wisatawan, terutama wisatawan muslim yang semakin sensitif terhadap kehalalan produk dan layanan. Persiapan untuk memperkenalkan wisata halal di Indonesia kepada wisatawan mancanegara dan domestik sebaiknya dilakukan dengan segera, sehingga tidak hanya Malaysia yang telah maju dalam hal ini.

Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi dapat berdampak signifikan pada industri pariwisata, termasuk desa wisata syariah di NTB. Perubahan kebijakan di sektor pariwisata, kondisi ekonomi internasional maupun lokal, dan faktor geopolitik adalah beberapa contoh yang dapat mempengaruhi prospek dan perkembangan desa wisata syariah. Misalnya, perubahan regulasi terkait visa atau pajak pariwisata dapat memengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB. Selain itu, kondisi ekonomi global dan lokal juga dapat mempengaruhi daya beli wisatawan dan kebijakan perjalanan mereka. Faktor geopolitik seperti konflik regional atau ketegangan politik juga dapat memengaruhi citra dan keamanan suatu destinasi pariwisata, yang pada gilirannya mempengaruhi minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan di NTB untuk memantau dengan cermat perubahan dalam faktor-faktor eksternal ini dan merencanakan strategi yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul.

Ancaman lain yang mungkin muncul adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh beberapa wisatawan saat berkunjung ke NTB. Terkadang, wisatawan tidak menjaga lingkungan dengan baik, seperti membuang sampah sembarangan atau merusak objek wisata dengan mencoret-coret. Selain itu, ada kemungkinan masuknya budaya luar yang tidak selaras dengan budaya di NTB, yang dapat mengganggu keunikan pariwisata di wilayah tersebut. Jika budaya luar tersebut akhirnya mendominasi budaya lokal, hal ini dapat mengurangi keaslian dan daya tarik pariwisata di NTB.

3.2. Pembahasan

Bagian Berdasarkan uraian diatas, tabel Analisis SWOT telah menguraikan dengan detail setiap analisis yang telah dilakukan baik dari segi Internal maupun Eksternal. Berikut ini adalah formulasi strategi pengembangan pariwisata halal di NTB berdasarkan EFAS dan IFAS:

IFAS/EFAS	KEBIJAKAN
Strategi SO	1. Optimalisasi Keindahan Alam dan Budaya: Mengembangkan paket wisata yang menonjolkan keindahan alam dan budaya lokal, dipromosikan melalui media digital.

	2. Dukungan BUMDes dan Edukasi Masyarakat: Menggunakan peran BUMDes untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep wisata syariah dan meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan pariwisata.
Strategi WO	1. Peningkatan Infrastruktur: Melibatkan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur desa. 2. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dan pengelola BUMDes dalam pariwisata syariah.
Strategi ST	1. Pengembangan Program Wisata Unik: Menciptakan program wisata yang unik dan berbeda untuk mengurangi persaingan dengan destinasi lain. 2. Penerapan Pariwisata Berkelanjutan: Menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Strategi WT	1. Diversifikasi Sumber Pendapatan Desa: Mengembangkan produk lokal yang sesuai dengan prinsip halal dan dapat dijual kepada wisatawan. 2. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait: Meningkatkan kolaborasi untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan politik serta mengurangi risiko lingkungan.

Adapun, dengan adanya beberapa hasil analisis di atas, untuk bisa menjaga pariwisata syariah agar selalu dikenal dan dapat menjadi daya tarik tersendiri, maka dibutuhkan beberapa strategi yang jitu agar selalu dapat mengembangkan pariwisata syariah di Nusa

Tenggara Barat, bahkan se-Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga eksistensi pariwisata syariah tawaran beberapa strategi yang dianggap penting yaitu:

NO	Strategi	Keterangan
1	Memversifikasi Produk Wisata	Kembangkan atraksi wisata baru seperti wisata edukasi (pertanian, perikanan), wisata alam (trekking, bird watching), dan wisata budaya (festival adat, workshop kerajinan). Buat paket wisata tematik seperti paket wisata keluarga, paket bulan madu, atau paket retreat spiritual yang semuanya berbasis syariah. Hal ini berdampak pada peningkatan Daya Tarik dan Keberagaman Wisata.
2	Meningkatkan dan Memelihara Infrastruktur	Bekerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk terus meningkatkan fasilitas jalan, transportasi, penginapan, dan fasilitas umum lainnya. Dan Pastikan ada program pemeliharaan berkelanjutan untuk semua fasilitas wisata, termasuk kebersihan dan perbaikan rutin. Hal ini berdampak pada aksesibilitas wisata
3	Membuat Pelatihan dan Pengembangan SDM	Meyelenggarakan pelatihan rutin untuk masyarakat dan pengelola BUMDes dalam manajemen pariwisata, pelayanan pelanggan, dan pemahaman syariah. Dorong masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi di bidang pariwisata, kuliner halal, dan manajemen homestay. Hal ini berdampak pada menciptakan SDM yang berkualitas dalam mengelola pariwisata
4	Melakukan Pemasaran dan Promosi Efektif	Gunakan strategi pemasaran digital yang kuat melalui media sosial, website, blog, dan platform pariwisata untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dan kolaborasi dengan influencer dan blogger wisata syariah untuk meningkatkan visibilitas desa wisata. hal ini berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan.
5	Melibatkan dan Memberdayakan Masyarakat	Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan dan operasional desa wisata untuk memastikan keterlibatan dan rasa memiliki. Bentuk koperasi atau kelompok usaha di bidang kuliner, kerajinan, dan jasa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemeliharaan budaya dan tradisi
6	Menerapkan Pariwisata Berkelanjutan	Terapkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik seperti daur ulang sampah, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini berdampak pada Konservasi Sumber Daya Alam.
7	Melakukan Kolaborasi dan Jaringan dengan berbagai pihak	Tingkatkan kerjasama dengan pemerintah, NGO, universitas, dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial, teknis, dan promosi. Bangun jaringan dengan desa wisata syariah lain untuk berbagi pengalaman, belajar praktik terbaik, dan mengembangkan program wisata bersama. Hal ini berdampak pada Akses ke Pendanaan dan Sumber Daya Finansial.
8	Melakukan Evaluasi dan Adaptasi	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap semua aspek pengelolaan desa wisata untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan standar. dan bersiap untuk beradaptasi dengan tren wisata baru dan kebutuhan wisatawan, serta terus berinovasi dalam menyediakan layanan dan produk wisata yang menarik. hal ini berdampak pada Peningkatan Kinerja dan Efisiensi dan Penyesuaian serta Inovasi dan Pengembangan wisata.
10	Melakukan Penguatan Brand dan Identitas Desa Wisata Syariah	Membangun dan mempromosikan identitas yang kuat sebagai desa wisata syariah yang unik dan autentik. Gunakan storytelling untuk menceritakan kisah unik desa dan penduduknya, meningkatkan daya tarik wisatawan dan kepercayaan terhadap desa wisata. hal ini berdampak pada menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dampak wisata halal berbasis bumdes di Nusa Tenggara Barat (NTB)

a. Peningkatan Ekonomi Lokal

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, akan terjadi peningkatan signifikan dalam ekonomi lokal. Hal ini terjadi melalui pendapatan tambahan yang diperoleh masyarakat dari berbagai sektor pariwisata, seperti penyediaan homestay, restoran halal, kerajinan tangan, dan layanan wisata lainnya. Selain itu, fenomena ini juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang sektor pariwisata, mulai dari pemandu wisata hingga pengelola homestay, serta pelaku usaha kuliner dan kerajinan.

b. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Melalui peningkatan kualitas infrastruktur, seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, transportasi, dan akomodasi yang lebih baik, akan tercipta aksesibilitas yang lebih baik dan pengalaman yang lebih nyaman bagi kedua wisatawan dan penduduk lokal. Dengan fasilitas penunjang yang lebih baik, seperti tempat ibadah yang layak, toilet bersih, dan restoran halal, akan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para wisatawan, meningkatkan tingkat kepuasan mereka selama berkunjung.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjadi peningkatan signifikan dalam keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait pariwisata syariah, manajemen pariwisata, dan pelayanan pelanggan. Melalui pelatihan dan pendidikan yang terfokus, masyarakat dapat memperoleh sertifikasi di berbagai bidang pariwisata, meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing baik di pasar lokal maupun global. Hal ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan.

d. Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Melalui upaya penguatan dan pelestarian budaya lokal, dilakukan integrasi kegiatan budaya yang otentik dan mendalam dalam atraksi wisata, serta edukasi wisatawan tentang nilai-nilai budaya yang dimiliki. Dengan demikian, tidak hanya terjaga keaslian budaya lokal, tetapi juga meningkatkan apresiasi dan pemahaman wisatawan terhadap warisan budaya yang berharga tersebut. Selain itu, praktik pariwisata

berkelanjutan yang diimplementasikan akan turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi, dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dan wisatawan. Dengan demikian, tercipta harmoni antara pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan pelestarian budaya dan lingkungan, menjadikan Desa Wisata Syariah sebagai destinasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

e. Penguatan Komunitas dan Identitas Lokal

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata, akan tercipta hubungan yang erat antara masyarakat dengan desa mereka, meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap identitas lokal. Dengan demikian, tercipta kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman budaya dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan ciri khas dari Desa Wisata Syariah. Melalui upaya penguatan identitas tersebut, desa menjadi lebih dikenal sebagai destinasi wisata yang unik dan autentik, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, terbentuk citra yang kuat dan reputasi yang baik bagi desa tersebut, yang akan meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan serta berpotensi untuk memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

f. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Melalui upaya diversifikasi sumber pendapatan, Desa Wisata Syariah dapat mengembangkan beragam produk lokal yang sesuai dengan prinsip halal, seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan pakaian syar'i, yang dapat ditawarkan kepada wisatawan baik secara langsung melalui toko-toko lokal maupun secara online. Dengan adanya berbagai produk yang unik dan berkualitas ini, desa dapat menarik minat wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas desa, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Selain itu, dengan memiliki beragam sumber pendapatan, desa menjadi lebih tangguh terhadap fluktuasi jumlah wisatawan dan risiko ekonomi lainnya, sehingga memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat desa.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pengembangan Desa Wisata Syariah berbasis BUMDes di NTB menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang terintegrasi dan berfokus pada optimalisasi keindahan alam dan budaya, dukungan terhadap BUMDes dan edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur, pengembangan program wisata unik, penerapan pariwisata berkelanjutan, diversifikasi sumber pendapatan, kolaborasi dengan berbagai pihak, evaluasi dan adaptasi, penguatan brand dan identitas, pemberdayaan komunitas, serta pelestarian budaya dan lingkungan, desa memiliki peluang untuk menjadi destinasi wisata yang menonjol dan berkelanjutan.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pengembangan, mengutamakan keberlanjutan lingkungan, serta menjaga keaslian budaya dan identitas lokal, Desa Wisata Syariah dapat menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, wisatawan, dan lingkungan sekitar. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, desa dapat mencapai potensi penuhnya sebagai destinasi wisata yang unik, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

5. REFERENSI

Adinugraha, Hendri Hermawan, Razie Bin Nasarruddin, Ahmad Rofiq, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Ade Yusuf Mujaddid, and Mila Sartika. 2020. "Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11(1):129–54.

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih. 2018. "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." *Human Falah* 5(1):28–48.

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. 2019. "Halal Lifestyle Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2):57–81.

Amir, Azhar, Taufan Daniarta Sukarno, and Fauzi Rahmawati. 2020. "Identifikasi Potensi Dan Status Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 4(2):84–98.

Battour, Mohamed, Moustafa Battor, and Muhammad Awais Bhatti. 2014. "Islamic Attributes of Destination: Construct Development and Measurement Validation, and Their Impact on Tourist Satisfaction." *International Journal of Tourism Research* 16(6):556–64.

DisKominfotikntb. 2019. "DUKUNG 99 DESA WISATA DI NTB, KEMENDES - PDDT KEMBANGKAN DIGITALISASI PERDESAAN." *Pemerintah NTB*. Retrieved (<https://ntbprov.go.id/post/program-unggulan/dukung-99-desa-wisata-di-ntb-kemendes-pddt-kembangkan-digitalisasi-perdesaan>).

Fahham, Achmad Muchaddam. 2017. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8(1):65–79. doi: 10.46807/aspirasi.v8i1.1258.

Harnika, Ni Nyoman, and Ida Ayu Nyoman Sutriani. 2022. "PARIWISATA BUDAYA DI DESA WISATA BUUN SEJATI KABUPATEN LOMBOK BARAT." *Paryatoka: Jurnal Pariwisata Budaya Dan Keagamaan* 1(1):32–42.

Al Hasan, Fahadil Amin. 2017. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2(1).

Hastutik, Dwi. 2020. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten."

Jackysan. 2022. "Daftar Lengkap Desa Wisata Di Nusa Tenggara Barat (NTB)." *Genpilomboksumbawa*. Retrieved (<https://www.genpilomboksumbawa.com/7155/daftar-lengkap-desa-wisata-di-ntb.html>).

Jaelani, Aan. 2017. "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." *International Review of Management and Marketing* 7(3):25–34.

Kusuma, Dwi Ariady, Ridan Muhtadi, and Fitriyana Agustin. 2022. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdes Di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8(1):156–85.

Lubis, M. Zaky Mubarak, and Zaky Mubarak. 2018. "Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product)." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3(1):31–47.

Mansyuroh, Firqah Annajiyah. 2018. "Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9(2):91.

- Muriano, Murianto. 2019. "Model Promosi Tiga Desa Wisata Di Lombok Tengah." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 8(2):43–50.
- Nisa, Khairun, and Suharti Suharti. 2023. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur." *Nusantara Hasana Journal* 2(8):245–51.
- NTB, disbudpar prov. 2019. "Pelatihan Digital Marketing Desa Wisata Diberikan Oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yang Bekerjasama Tim Google." *Dinas Pariwisata Provinsi NTB*. Retrieved (<https://www.disbudpar.ntbprov.go.id/pelatihan-digital-marketing-desa-wisata-bersama-tim-google/>).
- NTB, IDN Times. 2022. "NTB Tangkap Peluang Pemasaran Destinasi Wisata Secara Digital." *Idntimesntb*. Retrieved (<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/ririn-sintani-1/ntb-tangkap-peluang-pemasaran-destinasi-wisata-secara-digital-c1c2>).
- Nuringsih, Nuringsih, Lismawati Lismawati, Andi Nuddin, and Trimulato Trimulato. 2019. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Rumah Tangga Di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2(2):223–39.
- Rahmad Kurniawan, Wahyu Akbar. 2019. "Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)." *Digilib.Iain-Palangkaraya*.
- Rini, Wafia Silvi Dhesinta, and Muhammad Insan Tarigan. 2020. "Pemanfaatan Wisata Mata Air Yang Dikelola Oleh BUMDES Di Desa Belik." *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 1(1):75–81.
- Selvia, Siska Ita, Idiatul Fitri Danasari, Ni Made Wirastika Sari, Baiq Rika Ayu Febrilia, and Sri Mulyawati. 2023. "Pengabdian Masyarakat Melalui Pendampingan Eksplorasi Potensi Dan Masalah Di Desa Wisata Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Timur." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 4(1):48–55. doi: 10.35311/jmpm.v4i1.178.
- Septono, Anugrah Dany. 2023. "APII Launching 99 Desa Wisata Halal Di NTB." *Timesindonesia*. Retrieved (<https://timesindonesia.co.id/wisata/190277/apii-launching-99-desa-wisata-halal-di-ntb>).
- Setiyawan, Agung. 2012. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13(2):203–22.
- Sukirman, Deden, and Wandy Zulkarnaen. 2022. "Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3(1):36–47.
- Tanjung, Agustini, Surya Bintarti, and Ergo Nurpatria. 2022. "Pengaruh Daya Tarik Wisata, Fasilitas, Dan Electronic Word Of Mouth Terhadap Minat Kunjungan Pada Situ Rawa Gede." *Ikraith-Ekonomika* 5(2):146–56.
- UNWTO. 2011. "Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilization." *UN TOURISM*. Retrieved (<https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284412792>).
- Wahyuni, Sri, and Rahmawati Rahmawati. 2021. "Analisis Potensi Pariwisata Syariah Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pantai Lawata Di Kota Bima)." *Jurnal Ar-Ribh* 4(1).
- Wirdayanti, Agnes, Amanah Asri, Bambang Dwi Anggono, Dwi Rudi Hartoyo, Enny Irdarti, Hasyim Gautama, Hermin Esti S, Kosmas Harefa, Maria Mesia, Monalisa Rumayar, Mustikorini Indrijatiningrum, Theresia Susanti, and Vitria Ariani. 2021. *Pedoman Desa Wisata [Tourism Village Guidelines]*.
- Zaini, Muh. 2021. "Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan:(Studi Kasus Pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)." *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman* 1(2):94–102.
- Zitri, Ilham, Artim Gushadi, Azwar Subandi, and Universitas Muhammadiyah Mataram. 2023. "Journal of Social and Policy Issues Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat: Implementasi Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika." 3.